

## **Mencari Kekuasaan Politik — Perempuan Dalam Parlemen di Mesir, Yordania dan Libanon.**

GEHAN ABU-ZAYD

SEBUAH STUDI MENGENAI ANGGOTA PARLEMEN PEREMPUAN DI ARAB mengungkapkan bahwa jumlah 68 persen anggota parlemen perempuan tersebut tidak memuaskan jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik perempuan belakangan ini. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kecilnya jumlah anggota parlemen perempuan di dunia Arab; kecilnya peran perempuan dalam pembagian ekonomi dan sosial; dan lemahnya perencanaan strategi bagi partisipasi perempuan. Perempuan Arab telah mengembangkan sejumlah strategi dan menjalankan berbagai mekanisme untuk memudahkan, tidak hanya masuknya mereka ke dalam politik, tetapi juga untuk meningkatkan kinerjanya dalam fora politik yang berbeda.

Dalam membahas isu-isu ini, pertama, kami menampilkan beberapa latar belakang mengenai berbagai kondisi yang mempengaruhi partisipasi perempuan di tiga negara Arab: Mesir, Yordania dan Libanon. Selanjutnya, kami membuat kerangka berbagai kendala terhadap partisipasi politik yang dihadapi perempuan di negara-negara tersebut, dan di dunia Arab pada umumnya. Kami membahas mekanisme perempuan dalam melakukan pengawasan untuk mengatasi kendala ini, baik dalam parlemen maupun dalam masyarakat pada umumnya. Kami juga mengadakan evaluasi khusus terhadap perempuan anggota parlemen di Mesir. Kajian ini mencermati partisipasi perempuan selama tiga periode dalam Majelis Rakyat Mesir. Yang digambarkan adalah berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan; isu-isu perempuan yang banyak terlibat di dalam; serta hasil-hasil yang telah mereka raih.

## ***Partisipasi Perempuan dalam Parlemen : Latar Belakang Ringkas***

### *Mesir*

Meskipun suatu fakta bahwa perempuan di Mesir kewarganegaraan serta hak-hak politiknya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1956, namun lingkungan sosial dan ekonomi di negara tersebut telah berjalan menentang hak-hak politik perempuan tersebut. Nilai-nilai yang mendorong partisipasi perempuan dalam urusan-urusan publik saling berdampingan dengan nilai-nilai reaksioner, dan akibatnya konflik di antara dua nilai tersebut telah menghabiskan banyak waktu. Dalam dua dekade terakhir ini, konflik tersebut menjadi lebih sensitif, terutama karena situasi politik dan ekonomi di Mesir.

Ekonomi Mesir saat ini dicirikan terutama oleh program penyesuaian struktural yang direkomendasikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF), yang menimbulkan dampak negatif terhadap perempuan. Kebijakan ini didasarkan pada dua unsur utama: (i) berkurangnya peran negara dalam bidang kesejahteraan sosial, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan; dan (ii) privatisasi industri-industri milik negara, yang mentransformasikan ekonomi ke suatu sistem yang berbasis kekuatan pasar.<sup>1</sup>

Kebijakan-kebijakan ini telah mempengaruhi situasi perempuan dalam banyak cara. Pertama, migrasi tenaga kerja telah menyebabkan banyak perempuan berperan sebagai kepala rumah tangga, dan ini meningkatkan beban sosial mereka. Pada saat yang sama, negara telah mundur dari peran tradisionalnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Ini telah memuluskan jalan bagi kelompok-kelompok Islam (kelompok-kelompok Islam yang menggunakan Islam untuk membenarkan keberadaan dan program-program mereka) untuk membangun pelayanan sosial dan amal bakti mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak pihak mengatakan bahwa kalangan Islam menggunakan jaringan kerja pelayanan sosial ini, untuk mendorong ideologi politik mereka yang bermusuhan terhadap perempuan, yang meminta kalangan perempuan kembali ke rumah. Akhirnya, partisipasi ekonomi perempuan mengalami penurunan dan perempuan terpinggirkan ke bidang-bidang tertentu yang tidak memungkinkan mereka meraih posisi-posisi senior atau untuk memperoleh pengalaman yang secara relevan memadai. Ini merupakan satu kendala yang terus menerus terjadi terhadap partisipasi perempuan dalam fora politik.

*Nilai-nilai yang mendorong partisipasi perempuan dalam urusan-urusan publik saling berdampingan dengan nilai-nilai reaksioner, dan akibatnya konflik di antara dua nilai tersebut telah menghabiskan banyak waktu. Dalam dua dekade terakhir ini, konflik tersebut menjadi lebih sensitif, terutama karena situasi politik dan ekonomi di Mesir.*

Lingkungan politik yang sedang berlangsung saat ini di mana anggota parlemen perempuan beraktivitas telah dibentuk dalam dua era besar; era gerakan nasionalis, 1919–1952, dan era negara satu partai dalam periode paska-kolonial, 1952-1976. Gerakan perempuan secara langsung terkait dengan gerakan nasionalis yang dipimpin oleh kalangan laki-laki dan perempuan terdidik yang berasal dari kalangan kelas menengah-atas. Perempuan menjadi aktif dalam gerakan nasionalis melalui keluarganya yang terkait dengan aktivitas politik laki-laki. Namun demikian perempuan tidak dilihat sebagai anggota yang penting dalam gerakan nasionalis tersebut dan mereka memiliki sedikit akses pada proses pengambilan keputusan. Para pemimin perempuan tidak memperjuangkan kebijakan yang memperlihatkan pemahaman yang benar mengenai permasalahan dan kebutuhan perempuan. Aktivitas politik perempuan berkisar pada tindakan amal serta memberikan pelayanan sosial; yang dalam kenyataannya ada sedikit perbedaan antara aktivitas politik perempuan dan aktivitas amalnya.

Menyusul revolusi 1952, semua partai politik dihapuskan dan sistem satu partai diperkenalkan selama hampir seperempat abad. Pemilihan umum tahun 1957 menjadi saksi atas partisipasi perempuan untuk pertama kalinya, dan Rawya 'Atiya terpilih menjadi anggota parlemen perempuan pertama di dunia Arab. Rezim ini, yang ditopang oleh ideologi sosialis, mencoba untuk mendorong partisipasi perempuan dalam semua posisi pemerintahan dan politik. Namun, kultur sistem satu partai tidak mendorong diterimanya pluralitas politik. Oleh karena itu, ketika sistem multipartai diperkenalkan kembali pada 1976, partisipasi politik perempuan rata-rata masih rendah, sebagaimana posisi mereka dalam masyarakat pada umumnya.<sup>2</sup>

Warisan ini, berdampingan dengan konstitusi dan legislasi nasional, telah memberi kontribusi dalam pembentukan lingkungan politik saat ini, ke dalam perempuan berpartisipasi dalam urusan publik. Mekanisme berbeda telah digunakan untuk memperlancar jalan bagi kehadiran perempuan ke dalam parlemen di Mesir, yang mencakup empat hal berikut:

1. Alokasi kursi untuk perempuan: 30 kursi di parlemen dicadangkan untuk perempuan sesuai dengan dekrit presiden tahun 1979;
2. Menominasikan perempuan dalam daftar partai dan menghapuskan alokasi kursi untuk perempuan;
3. Perempuan mencalonkan diri sebagai kandidat perorangan dalam pemilihan parlemen;
4. Perempuan ditunjuk sebagai anggota parlemen oleh presiden, yang mempunyai hak untuk menunjuk sampai 10 anggota parlemen, proporsi yang selalu diberikan kepada perempuan.

Keempat mekanisme ini dievaluasi berdasarkan pada hubungan antara jumlah perempuan dalam parlemen, jumlah dan jenis isu yang mereka ajukan, dan berbagai hal teknis yang mereka gunakan untuk mengangkat isu-isu.

#### *Yordania*

Pada tahun 1974, perempuan di kerajaan Yordania dijamin hak pilihnya. Sejak parlemen menghentikan aktivitasnya dari tahun 1968-1984, pemilihan anggota parlemen pertama ke dalam perempuan ikut memilih, diselenggarakan pada tahun 1989. Dari 10 perempuan yang dicalonkan sebagai kandidat dalam pemilihan tersebut, tidak satupun yang memenangkan kursi.

*“Perempuan yang mendapatkan kesulitan tidak harus mengatakan bahwa hal itu sulit. Pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa perempuan dapat memilih untuk tidak menyerah dan tidak diremehkan hanya karena ia seorang perempuan.”*

Tujan Al-Faysal

Dalam pemilihan anggota badan legislatif yang kedua pada tahun 1993, hanya dua orang perempuan yang mencalonkan diri untuk anggota parlemen, dan satu diantaranya, Tujan al-Faysal, memenangkan satu kursi. Meskipun pada kenyataannya Faysal sebelumnya belum pernah terlibat urusan politik (sebelumnya ia aktif di media), ia mengajukan satu platform politik yang terpadu, yang tidak diajukan oleh para pesaingnya yang laki-laki. Platformnya didasarkan pada konsep hak asasi manusia, dan karenanya masuk akal juga kalau ia bertahan sebagai seorang kandidat independen. Ia mencalonkan dirinya sendiri sebagai kandidat independen untuk pemilihan legislatif pada tanggal 4 Nopember 1997, tetapi tidak memenangkan satu kursi pun. Kenyataannya,

tidak satupun perempuan yang memenangkan kursi dalam pemilihan itu. Berbagai alasan mengenai hal ini telah didiskusikan dalam buku pedoman ini termasuk :

- Kultur politik laki-laki yang menentang partisipasi kesetaraan perempuan dalam arena politik;
- Kurangnya dukungan partai dan pelindungnya;
- Kurangnya dukungan media massa;
- Kurangnya kepercayaan di antara para pemilih bahwa perempuan secara aktual dapat memenuhi janji-janjinya dalam pemilu;
- Demokrasi yang baru berkembang memungkinkan adanya manipulasi proses pemilihan dan hasil-hasilnya;
- Kurangnya jaringan kerja dan kerja sama antara organisasi perempuan dan anggota parlemen perempuan.

Titik pandang Tujan al-Faysal untuk memperdebatkan keberpihakan pada hak perempuan yang didasarkan pada hak asasi manusia, secara berulang-ulang ditunjukkan dalam perdebatannya di parlemen. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memperoleh popularitas dengan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan masalah-masalah pelayanan dalam parlemen, tetapi melalui diskursus politiknya, yang dipahami dan didukung oleh konstituantenya. Mereka juga telah mendukung RUU yang telah diusulkan ke parlemen, terutama berkisar memajukan demokrasi. Ia menggambarkan sifat-sifat dari penampilannya dalam parlemen Yordania dengan mengatakan, “Saya sedang mencoba untuk mengusulkan suatu bentuk baru dari kerja parlemen, suatu tipe yang menawarkan solusi radikal terhadap isu-isu politik.”<sup>3</sup>

Diskursus politik independen Faysal memprovokasi kecenderungan-kecenderungan religius dan konservatif dalam parlemen, tetapi keyakinannya yang menggebu-gebu mengenai demokrasi dan hak asasi manusia serta pengetahuannya mengenai Islam memperoleh penghormatan di kalangan anggota masyarakat dan menimbulkan permusuhan dengan pemerintahan yang berkuasa. Seperti seorang anggota parlemen, ia memainkan suatu peran kunci dalam mengungkap kasus-kasus korupsi dan penyelewengan. Menurutnya, “Perempuan yang menemukan kesulitan tidak harus mengatakan bahwa hal itu sulit. Pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa seorang perempuan dapat memilih untuk tidak menyerah dan tidak diremehkan hanya karena ia seorang perempuan.”<sup>4</sup>

Ada berbagai variasi strategi yang digunakan oleh anggota parlemen Yordania untuk menciptakan suatu pengaruh. Yang sering disebut oleh Faysal, sebagai contoh, termasuk hal sebagai berikut: pengumpulan dan pengkajian informasi yang relevan dengan isu-isu yang sedang didiskusikan; menghadirkan kasus dengan cara paksa, dan pada saat yang tepat; membentuk kelompok penekan dengan anggota parlemen lainnya yang mendukung untuk dengar pendapat dalam soal perundang-undangan baru; mengembangkan dan menyandarkan pada dukungan dari luar parlemen, dan khususnya dari media yang memiliki hubungan yang baik.

### *Libanon*

Perempuan Libanon telah duduk dalam parlemen sejak tahun 1992, menyusul 17 tahun perang sipil yang telah merusak berbagai praktik demokratis. Pada pemilihan 1992, perempuan memenangkan tiga kursi, yaitu 2,3 persen dari total kursi yang ada.<sup>5</sup> Inilah saat pertama perempuan memasuki parlemen dan ini merupakan suatu transformasi yang mendasar, sejak perempuan hadir dalam kehidupan parlemen dua kali antara 1952-1962. Pada pemilihan 1992 tersebut, satu orang perempuan dari utara, seorang dari selatan, dan seorang lagi dari pegunungan memenangkan kursi. Perempuan masuk dalam pemilihan dengan tujuan menantang diskriminasi politik terhadap mereka. Namun, pelaksanaan ini tidak mendapat dukungan dari perempuan seperti yang diharapkan, meskipun kenyataan menunjukkan bahwa perempuan secara ekonomi sangat aktif dalam masyarakat Libanon.

Menurunnya jumlah anggota parlemen perempuan merupakan suatu tantangan bagi tiga anggota parlemen perempuan yang memenangkan kursi tersebut, dan mereka harus berjuang untuk menciptakan saluran melalui berbagai isu perempuan agar dapat didengar. Akibatnya, dalam lingkungan yang positif, hal ini telah menyumbang pada perkembangan perundang-undangan yang relevan dengan perempuan. Anggota parlemen perempuan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa politik, khususnya yang berkaitan dengan pendudukan Israel, dan aktif di bidang pelayanan sosial, karena ini penting bagi masyarakat Libanon setelah bertahun-tahun mengalami kerusakan infrastruktur mereka serta krisis ekonomi yang maha hebat.

*“Kami belum dapat menciptakan satu pun badan solidaritas perempuan; kami belum mencapai posisi menteri; dan kami belum berhasil menghapus diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam*

*undang-undang status pribadi. Ini adalah kenyataan bahwa kami berhasil di profesi yang lain, tetapi tidak di bidang politik.”*

Maha al-Khuri dan Bahaya al-Hariri

Namun demikian, ketiga anggota parlemen tersebut tidak merasa puas dengan tingkat keberhasilan perempuan, dan mengatakan bahwa mereka masih perlu bekerja untuk memperluas jaringan dukungan mereka dan untuk menegakkan gerakan solidaritas bersama untuk menyatukan berbagai upaya. Maha al-Khuri dan Bahaya al-Hariri sudah mengatakan, “Kami belum dapat menciptakan satu pun badan solidaritas perempuan; kami belum mencapai posisi menteri; dan kami belum berhasil menghapus diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam undang-undang status pribadi. Ini adalah kenyataan bahwa kami berhasil di profesi yang lain, tetapi tidak di bidang politik. Namun pada dasarnya perempuan Libanon sudah cukup berhasil mendekati kesetaraan dan sudah masuk bidang-bidang seperti administrasi, bisnis dan perdagangan.”<sup>6</sup>

### ***Batasan-batasan yang Dihadapi Anggota Parlemen Perempuan***

Satu analisa yang dilakukan pada tahun 1995 yang didasarkan pada kesaksian perempuan Arab yang ambil bagian dalam urusan publik, menunjukkan bahwa perempuan mampu meraih tujuan-tujuan politiknya lebih dari 80 persen dari usaha mereka, kalau mereka mempunyai visi dan tujuan yang jelas. Berbagai rintangan yang mereka hadapi sebagian besar adalah mengenai masalah sosial, kultural dan material, dan tidak terkait dengan kehadiran sebenarnya perempuan dalam parlemen.<sup>7</sup>

Berikut adalah daftar singkat mengenai batasan-batasan tersebut menurut hakekat politik, ekonomi dan sosial mereka.

#### *Batasan-batasan Politik*

1. Batasan-batasan terhadap partai politik mengarah pada melemahnya partisipasi demokratis, dan selanjutnya merupakan suatu kendala yang lebih besar terhadap partisipasi politik perempuan.
2. Rendahnya tingkat melek huruf bagi perempuan, dan sebagai akibatnya menimbulkan kesadaran politik yang rendah, dan ini dapat mengarah kepada keberadaan hak pilih perempuan yang dimanfaatkan oleh pihak lain.<sup>8</sup>

3. Berbagai tradisi memaksa perempuan dalam peran-peran yang mengarah kepada penyingkiran mereka dari proses pembuatan keputusan langsung.<sup>9</sup>
4. Dukungan politik bagi perempuan tidak konsisten dan berkaitan dengan agenda internasional.
5. Kekuatan-kekuatan yang reaksioner mempengaruhi masyarakat dan mendorong marjinalisasi perempuan serta membatasi perannya, menentang partisipasi politiknya, apakah di dalam atau di luar parlemen (misalnya di Yordania).<sup>10</sup>
6. Kurangnya undang-undang yang mempromosikan dan memastikan partisipasi perempuan dalam parlemen, meskipun ada berbagai amandemen.
7. Undang-undang darurat menghalangi demokrasi dan pembangunan politik, yang selanjutnya berpengaruh pada kesadaran politik. Dalam pengalaman Libanon, beberapa anggota parlemen perempuan bagaimanapun juga terkait dengan figur laki-laki tertentu dan dianggap sebagai kepanjangan dari laki-laki tersebut, sekalipun jika ia meninggal.
8. Politik berkaitan dengan kemampuan anggota parlemen untuk menyediakan pelayanan-pelayanan, daripada berbagai pertimbangan ideologis. Hal ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan.
9. Peran politik perempuan telah diabaikan pada masa-masa krisis, mencegah perkembangan pengalaman politik mereka dan ini menimbulkan frustrasi (misalnya di Libanon).

#### *Batasan-batasan Ekonomi*

1. Kajian yang sama mengindikasikan bahwa kendala-kendala ekonomi merupakan 75 persen dari permasalahan yang dihadapi perempuan anggota parlemen, dari sudut pandang tingginya biaya hidup dan kebutuhan untuk mengelola pendapatan mereka untuk keluarganya.<sup>11</sup>
2. Kajian ini membuktikan bahwa 64 persen dari perempuan mengatakan bahwa kesulitan-kesulitan ekonomi telah memberi mereka waktu yang tidak memadai untuk tertarik dalam urusan-urusan publik. Di samping itu, perempuan kekurangan dalam hal sumberdaya yang akan memungkinkan mereka berpartisipasi secara politik, mengingat biaya kerja politik dan sosial tergolong tinggi.<sup>12</sup> Kemandirian perempuan dalam bidang keuangan saja bukan suatu kondisi yang memadai agar mereka mampu berpartisipasi dalam parlemen. Mereka harus juga

memiliki suatu tingkat yang cukup tinggi dari sumber-sumber keuangan untuk memungkinkan mereka mengambil peran dalam parlemen, khususnya peran dalam memberikan pelayanan. Ini adalah kendala utama yang disepakati oleh anggota parlemen perempuan Mesir dan Libanon.

3. Kebijakan ekonomi telah secara negatif mempengaruhi perempuan dari segi standar kehidupan, pendapatan, serta tingkat pengangguran. Ini telah melemahkan kemampuan mereka untuk berkompetisi, karena perempuan dihalangi untuk mendapat akses ke berbagai kesempatan pelatihan dan pendidikan yang memadai dan perempuan terus tergantung pada suaminya secara ekonomi.

#### *Batasan-batasan Sosial*

1. Buta huruf di kalangan perempuan membuat sulit bagi anggota parlemen perempuan untuk merangkul perempuan lainnya, membatasi kesadaran politik perempuan, dan akhirnya membuat sebagian besar perempuan tidak terdaftar pada daftar pemilihan.
2. Kajian menunjukkan bahwa 44 persen anggota parlemen perempuan yang diwawancarai mengatakan bahwa karena tanggungjawab rumah tangganya, mereka tidak hadir pada sidang-sidang anggota parlemen sesering anggota parlemen laki-laki.
3. Undang-undang merupakan salah satu kendala sosial utama yang dihadapi perempuan. Perempuan masih mengalami diskriminasi terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga, nasionalitas, hak untuk bepergian, dan hak untuk bekerja. Hal ini membuat perempuan tidak dapat berpartisipasi secara mandiri dalam kehidupan publik.
4. Lingkungan politik memainkan peran besar dalam mendukung nilai-nilai reaksioner pada satu momen tertentu dan menceraikan nilai-nilai pada momen yang lain, dan hal ini akibatnya, mempengaruhi hak-hak perempuan. Lingkungan politik saat ini di Mesir dan Yordania tidak mendukung perempuan, karena diberlakukannya kembali nilai-nilai dan tradisi-tradisi reaksioner dari masa silam yang merupakan kendala besar bagi anggota parlemen perempuan dan perempuan pada umumnya.
5. Meratanya gagasan tradisional tertentu dalam berbagai komunitas, seperti suku Badui di Mesir atau beberapa suku di Yordania, Mesir,

dan Libanon, kadangkala mencegah perempuan keluar atau dari bergaul dengan kaum laki-laki. Seorang anggota parlemen perempuan Mesir dilaporkan bahwa ada kepala suku tertentu yang mengatakan kepadanya bahwa ia akan memobilisasi seluruh anggota sukunya untuk mencegah seorang perempuan mencalonkan dirinya dalam sebuah pemilihan umum. Seorang perempuan anggota parlemen Libanon mengatakan bahwa kebanyakan kendala utama yang dihadapi perempuan Arab adalah kenyataan bahwa tradisi-tradisi membuat perempuan menganggap dirinya sebagai warga negara kelas dua.

6. Kehidupan publik para anggota parlemen dicemarkan dan, menurut anggota parlemen perempuan Yordania, isu ini lebih sensitif bagi perempuan anggota parlemen.

### ***Mekanisme yang Digunakan untuk Mengatasi Batasan-Batasan Ini***

Langkah pertama dalam mengatasi kendala yang dihadapi perempuan Arab adalah dengan mengakui berbagai kesulitan dan memahami lingkungan yang menciptakan kendala-kendala tersebut. Dalam berbagai wawancara, anggota parlemen perempuan menunjukkan satu kesadaran yang tinggi atas kendala-kendala tersebut dan telah mengambil jalan untuk menyusun berbagai strategi dalam upaya mereka untuk mengatasinya. Ini dapat dibagi dalam dua kelompok mekanisme; mereka yang berada dalam parlemen dan lainnya yang ada di luar parlemen.

#### *Mekanisme di luar Parlemen*

1. Anggota parlemen perempuan secara berangsur-angsur melakukan perubahan terhadap tradisi yang membatasi perempuan, khususnya dalam komunitas kesukuan. Seorang anggota parlemen perempuan mengatakan bahwa hanya dengan menyediakan perempuan transportasi dan tempat pemberian suara khusus bisa menarik beberapa dari perempuan anggota suku tersebut dapat untuk memilih.
2. Perempuan telah berperilaku moderat dalam menyampaikan berbagai opini dan posisinya, sehingga mereka tidak menghadapi konflik dengan tradisi-tradisi masyarakat. Ini termasuk cara mereka berbicara, cara mereka berpakaian, serta dalam hubungan kemasyarakatan dan individu.
3. Kerjasama dengan organisasi perempuan yang melakukan peningkatan

- kesadaran hukum perempuan berkaitan dengan hak pilihnya. Sebagai contoh, di Yordania, anggota parlemen perempuan memahami pentingnya suara perempuan dan bekerja untuk melobi organisasi perempuan.
4. Kerjasama dengan pemimpin laki-laki dalam komunitas lokal dalam rangka untuk mempengaruhi mereka agar menukung posisinya. Anggota parlemen perempuan Mesir telah menggunakan cara-cara seperti itu.
  5. Menggunakan semua sarana komunikasi/media yang tersedia untuk memperluas dukungannya dalam komunitas lokal.
  6. Menggunakan statistik dan data lain untuk merencanakan kampanye mereka dengan teliti.
  7. Mempelajari pengalaman perempuan lain dan memetik pelajaran-pelajaran ini untuk memperbaiki kinerja mereka.
  8. Memperkuat kedudukan dasar mereka menghadapi serangan yang sifatnya personal dan perlawanan yang didasarkan pada ideologi atau gender.
  9. Menekankan nilai-nilai dan kekuatan-kekuatan positif yang berakar dalam masyarakat, khususnya ketika mereka mengalami perubahan. Yaitu, mereka telah menunjukkan bahwa apa yang mereka suarakan adalah keharmonisan dengan nilai-nilai dasar masyarakat serta suatu kontinuitas yang bertentangan dengan masuknya pola-pola dan norma-norma kultural asing.

#### *Mekanisme di dalam Parlemen*

1. Anggota parlemen perempuan mengatakan bahwa peran mereka dalam parlemen terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah untuk belajar dan menjadi terbiasa dengan aturan-aturan dan garis tegas permainan politik, memformulasikan berbagai strategi yang didasarkan pada pengetahuan ini; dan kedua untuk membidik sasaran lobi. Anggota parlemen perempuan Yordania, sebagai contoh, telah mengindikasikan bahwa mereka telah berkonfrontasi baik dengan kekuatan konservatif maupun beberapa anggota parlemen pemerintahan. Mereka percaya bahwa berbagai mekanisme di atas tidak khusus untuk perempuan, tetapi untuk semua politisi. Mereka juga percaya bahwa meskipun ada suatu tingkat kekhususan gender ketika menunjuk pada berbagai kendala di luar parlemen, kendala-kendala ini tidak ada dalam parlemen dan anggota parlemen perempuan diperlakukan dalam parlemen seperti

anggota parlemen, bukan sebagai perempuan. Oleh karena itu, mekanisme-mekanisme yang mereka gunakan sama dengan yang digunakan oleh anggota parlemen laki-laki. Namun, mereka juga mengatakan bahwa mereka harus selalu teliti agar akurat dalam menumpulkan dan menganalisa informasi untuk menghindari kesemberonoan atau ketidakefisienan yang disebabkan oleh gendernya.

2. Anggota parlemen perempuan yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka perlu belajar lebih banyak mengenai posisi perempuan dalam pembuatan undang-undang dan masalah keagamaan yang relevan dalam rangka mempertahankan hak perempuan. Seorang anggota parlemen perempuan Kristen Mesir mengatakan, “Saya harus memahami Islam dan Kristen agar dapat mempertahankan undang-undang mengenai anak-anak dan ibu.”
3. Melakukan lobi terhadap anggota parlemen perempuan lainnya atau anggota parlemen laki-laki yang simpatik dalam rangka untuk memperoleh dukungan dalam penyusunan rancangan undang-undang dalam parlemen.
4. Beberapa anggota parlemen perempuan telah menunjukkan bahwa meningkatnya akses ke informasi dan keahlian menempatkan titik silangnya juga membantu perempuan berpartisipasi dalam kehidupan publik dan membuka bidang-bidang baru untuk mereka.<sup>13</sup>

### ***Kesimpulan: Menciptakan Sebuah Dampak***

Anggota parlemen perempuan mengembangkan berbagai taktik dan menjalankan berbagai mekanisme dalam rangka mempermudah tidak hanya masuknya mereka ke dalam politik, tetapi juga kinerja mereka di dalam fora politik yang berbeda. Berbagai mekanisme ini, meskipun tingkat tekanannya berbeda, tetapi mempunyai kecenderungan memiliki banyak unsur yang sama: perlunya mempelajari proses politik itu sendiri, serta tujuan dan berbagai upaya untuk memanfaatkan apa yang telah dipelajari untuk mempengaruhi perubahan yang mengarah pada berbagai jalan yang harmonis dengan keseluruhan dinamika kultural dan sosial.

Hal lain yang perlu ditegaskan ulang dikalangan anggota parlemen perempuan Arab adalah kebutuhan akan pendidikan pada umumnya, dan akses ke informasi dan data pada khususnya. Juga, hampir semua anggota

parlemen perempuan yang diwawancarai, menuntut keuntungan dari mata rantai yang berkembang dalam komunitas yang sedang mereka layani: apakah dengan organisasi perempuan, atau dengan para pemimpin komunitas lokal, laki-laki atau perempuan, meskipun mereka cenderung memilih yang pertama. Faktor penting lainnya (dan yang secara langsung relevan untuk diusulkan dalam buku pedoman ini) berhubungan dengan kebutuhan segera untuk mempelajari dan membagi pengalaman dengan perempuan lain yang berbeda dalam posisi yang sama diseluruh dunia. Akhirnya, kesadaran untuk membentuk hubungan yang ajeg (dan kegiatan lobi) dengan kolega, khususnya kolega laki-laki, dalam parlemen harus ditekankan berulang-ulang. Diharapkan bahwa berbagi pengalaman lebih jauh dan usaha yang gigih akan memungkinkan representasi yang lebih setara dan efisien dari perempuan dalam parlemen Arab.

### **Catatan**

- 1 Ibrahim, Saad Eddin. 1996. *Al-Mar'a Al-Misriya wa-l-Hayat Al-Ama* (Perempuan Mesir dan Kehidupan Publik). Cairo: Ibn Khaldun Center for Development Studies. Hal. 17-41.
- 2 Al-Baz, Shahida. 1995. *Al-Quyud Al-Iqtisadiya wa-l-ijtima'iyah wa athariha 'ala Al-Mar'a* (Batasan-batasan Ekonomi dan Sosial dan Dampak terhadap Perempuan). Cairo: Al Jeel Center. Hal. 55.
- 3 Wawancara pribadi dengan Tujan al-Faysal, 1994.
- 4 Ibid.
- 5 Pada pemilihan umum tahun 2000, tiga orang perempuan terpilih lagi masuk ke parlemen, dengan jumlah total bersisa sebesar 2.3 persen dari total kursi. Lihat: [www.ipu.org/wmn-e/classif.htm](http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm).
- 6 Wawancara pribadi dengan anggota parlemen Libanon, Maha Al-Khuri dan Bahaya Al-Hariri, 1994.
- 7 Al-Hadidy, Hana. 1996. "Research on Public Participation of Arab Women". Dalam Hana Al-Hadidy, red. *Al-Mar'a Al-Arabiya wa-l-Hayat Al-Ama* (Perempuan Arab dan Kehidupan Publik). Cairo: Ibn Khaldun Center for Development Studies. Hal. 59.
- 8 Ibid.
- 9 Ibid.
- 10 Wawancara dengan Tujan al-Faysal, Juni 1994.
- 11 Al-Hadidy. Hal 60.
- 12 Ibid.
- 13 Moussa, Ghada A. 1997. *Political Systems and the Open Door Policy: Its Impact on Women's Participation – A Case Study*. M.A. Thesis. Cairo University.

## ***Acuan dan Bacaan Lanjutan***

Al-Baz, Shahida, 1996. *Al-Quyud Al-Iqtisadiya wa-l-ijtima'iyah wa athariha'ala Al-Mar'a*. (Batasan-batasan Ekonomi dan Sosial serta Pengaruhnya pada Perempuan). Cairo: Al-Jeel Center.

Al-Hadidy, Hana, 1996. "Research on Public Participation of Arab Women". Dalam Al-Hadidy, red. *Al-Mar'a Al-Arabiya wa-l-Hayat Al-Ama* (Perempuan Arab dan Kehidupan Publik). Cairo: Ibn Khaldun Center for Development Studies.

Al-Naqash, Farida. 1994. *Tatawur Al-Musharaka Al-Siyasiya li-l-Mar'a Al-Misriya* (Perkembangan Partisipasi Politik Perempuan). Cairo: Cairo University, Department of Political Science and Economics.

Ibrahim, Saad Eddin. 1996. *Al-Mar'a Al-Misriya wa-l-Hayat Al-Ama* (Perempuan Mesir dan Kehidupan Publik). Cairo: Ibn Khaldun Center for Development Studies.

Moussa, Ghada A. 1997. *Political Systems and the Open Door Policy: Its Impact on Women's Participation – A Case Study*. M.A. thesis, Cairo University.

Wahbi, Azza, red. 1995. *Al-Mar'a Al-Misriya wa-l-Ajiza Al-Tashri'iyah* (Perempuan Mesir dan Mekanisme Legislatif). Cairo: Markaz Al-Buhuth wa-l-Dirasat Al-Siyasiya.

